

Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

H. Mudrika Alamsyah Hasan

Dwi Shintya P.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia dan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan Pemda. Populasi dari penelitian ini adalah Pengelola SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada tiap SKPD. Untuk mengumpulkan data penelitian, dilakukan dengan mengirimkan kuisioner kepada responden tersebut. Total kuisioner yang dikirim adalah 126 kuisioner dan jumlah yang dapat digunakan untuk pengujian adalah sebanyak 103 kuisioner. Untuk menguji pengaruh SDM, TI dan PIA terhadap keandalan dan ketepatan waktu digunakan regresi berganda Hasil pengujian membuktikan bahwa SDM dan TI tidak berpengaruh terhadap keandalan tapi pengendalian berpengaruh terhadap keandalan. Kemudian teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu sedangkan SDM tidak berpengaruh.

Keywords: *Local government financial reporting, information value, human resource, Information technology, and accounting intern control.*

1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah memberikan pelimpahan sebahagian besar kewenangan Pemerintah Pusat baik kepada Daerah Provinsi maupun kepada Daerah Kabupaten/Kota. Pelimpahan kewenangan dalam rangka desentralisasi juga disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang telah diberikan, terutama dalam hal keuangan, maka pemerintah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan CaLK.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah (PP 71 tahun 2010). Informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah hanya akan bermanfaat jika informasi tersebut mempunyai kualitas yang baik. Informasi yang berkualitas menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki umpan balik, memiliki nilai prediktif serta disampaikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan andal apabila Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketepatan waktu menunjukkan kecepatan atau rentang waktu antara permintaan dan frekuensi pelaporan informasi yang diinginkan. Informasi yang tepat waktu akan menjadikan manajer mampu menghadapi ketidakpastian lingkungan yang dihadapinya secara efektif (Gordon dan Narayanan, 1984).

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah, yaitu sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern serta pengawasan keuangan daerah.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang

pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan (Hevesi, 2005). Pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, tidak mengikuti pelatihan-pelatihan akuntansi serta tidak punya pengetahuan yang memadai tentang akuntansi akan menemui banyak kesulitan dan hambatan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terutama di Provinsi Riau (Laporan Supervisi BP2AK diberbagai SKPD di Riau, 2010), sehingga laporan keuangan yang disampaikan tidak dapat diandalkan serta tidak tepat waktu yang dapat mengurangi nilai informasi tersebut yang pada akhirnya hasil Audit BPK menghasilkan opini Wajar dengan Pengecualian untuk beberapa daerah di Provinsi Riau (Laporan Audit BPK tahun 2010).

Hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemda Subosukawonosraten. Akan tetapi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Andriani (2010) juga menunjukkan bahwa bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemkab Pesisir Selatan. Akan tetapi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil Penelitian Arfianti (2011) menunjukkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan PEMDA Batang, akan tetapi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemda tersebut. Penelitian Indriasari (2008) menunjukkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, akan tetapi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemda tersebut.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian Indriasari (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dan penelitian Andriani (2010) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian Arfianti (2011) pemanfaatan teknologi hanya berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan dan tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan

laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Arfianti (2011) menunjukkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Rosalin (2011) menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan tapi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan BLU di Kota Semarang.

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010). Menurut Mardiasmo, dalam Pasal 33 UU No 33/2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi mendukung kebijakan Depkeu tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan yang dapat dijadikan dasar sanksi tersebut: (1) UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (2) faktor koordinasi nasional, yaitu kondisi pelaporan perda APBD yang sering terlambat sehingga mengganggu perekonomian nasional (3) faktor kepentingan daerah. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatan waktu (*timeliness*). Keterandalan dan ketepatan waktu merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menguji kembali bagaimana pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini terkait dengan banyaknya temuan dari hasil audit BPK untuk beberapa daerah di Provinsi Riau, dimana kebanyakan opini yang diberikan adalah "Wajar dengan Pengecualian", seperti untuk Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak. Untuk Pemda Riau opini yang diberikan Wajar Tanpa Pengecualian, tapi BPK RI tetap memberikan catatan masih ada tiga item pertanggungjawaban APBD Riau 2010 yang harus dibenahi administrasinya (sumber, <http://pekanbaru.bpk.go.id/web/?p=12895>). Hasil temuan BPK tersebut mengisyaratkan masih banyaknya penyimpangan yang terjadi dimana penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disampaikan kurang memiliki nilai yang bermanfaat bagi pemakai.

2. Tujuan

- a) Mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b) Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- c) Mengetahui pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- d) Mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- e) Mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Luaran

- a) Menghasilkan Sarjana Akuntansi
- b) Menghasilkan Jurnal Ilmiah

4. Metode Penelitian

a. Data dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian survey. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner pada responden. Populasi dari Penelitian ini adalah Pengelola SKPD di Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive / judgement sampling*. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD.
- 2) Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga tiap SKPD ditetapkan secara cluster sampling sebanyak 3 orang yang menjadi responden.
- 3) Responden ditetapkan pada kepala bagian, staf pencatatan keuangan/akuntansi dan staf pemegang kas SKPD.

b. Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi. Variabel Dependen adalah Ketepatan Waktu dan Keandalan Laporan Keuangan.

Masing-masing variable diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

c. Instrumen Penelitian

Sumber Daya Manusia.

Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi /kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ & USAID/CLEAN Urban, 2001). Konstruk Kapasitas Sumber Daya Manusia diukur dengan indikator:

- 1) Kapasitas Staf; merupakan standarisasi kapasitas staf bagian keuangan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
- 2) Tupoksi; merupakan uraian peran dan fungsi yang jelas bagi seorang staf bagian keuangan/akuntansi yang ditunjang dengan sistem dan prosedur yang jelas.
- 3) Pengembangan; merupakan upaya penguasaan dan pengembangan keahlian staf, baik formal maupun non-formal.

Teknologi Informasi.

Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali & Supomo, 2002). Konstruk Pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator:

- 1) Perangkat; merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, keras dan system jaringan.
- 2) Pengelolaan Data Keuangan; merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh.
- 3) Perawatan; merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

Pengendalian Intern Akuntansi (PIA).

Bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi (Standar Profesional Akuntan Publik, SA Seksi 319). Konstruk Pengendalian Intern Akuntansi diukur dengan indikator formatif:

- 1) Lingkungan pengendalian; merupakan upaya untuk meningkatkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.
- 2) Penilaian risiko; merupakan upaya untuk mengidentifikasi risiko dan menganalisis risiko yang akan terjadi pada organisasi sektor publik.
- 3) Kegiatan pengendalian; merupakan upaya untuk melakukan review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan termasuk di dalamnya adalah pemisahan tugas.
- 4) Informasi dan komunikasi; merupakan upaya untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- 5) Pemantauan pengendalian intern; merupakan upaya pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revid lainnya.

Keterandalan.

Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). Konstruk Nilai Informasi Keterandalan diukur dengan indikator:

- 1) Kewajaran;
- 2) Kelengkapan unsur Laporan Keuangan;
- 3) Dapat diuji;
- 4) Generalisasi.

Ketepatan Waktu.

Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (PP No. 24 Tahun 2005). Konstruk nilai informasi ketepatanwaktuan diukur dengan indikator:

- 1) *Timelines*;
- 2) Sistematis waktu;
- 3) Sistematis unsur;

d. Pengujian dan Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevaliditan butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk mengetahui validitas

konstruk (Sekaran 2009). Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Alat uji yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi tersebut adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Masing-masing instrumen harus memiliki nilai KMO MSA (*Measure of sampling adequacy*) lebih dari 0.50 sehingga data yang dikumpulkan dapat dikatakan tepat untuk analisis faktor (Ghozali,2005). Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *cronbach alpha* lebih dari 0.60 (Hair *et al.*, 2006).

Pengujian asumsi untuk memenuhi syarat regresi

Uji Normalitas Data.

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan melihat *normal probability plot*. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (ghozali, 2005).

Uji Multikolinearitas.

Dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen. Jika nilai VIF > 10 atau nilai tolerance < 0,10 berarti terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2005).

Uji Autokorelasi .

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan penggunaan pada periode t-1. Pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson*. Batasan tidak terjadinya autokorelasi adalah -2 sampai +2.

Uji Heterokodestisitas.

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk membuktikan ada atau tidaknya gangguan heteroskodestisitas dapat dilihat melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*) tidak membentuk pola tertentu disini yang mana polanya menyebar, maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskodestisitas.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 15. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persamaan 1: } Y_1 = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$\text{Persamaan 2: } Y_2 = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y1 = Keandalan Lap Keuangan

Y2 = Ketepatan waktu

X1 = SDM

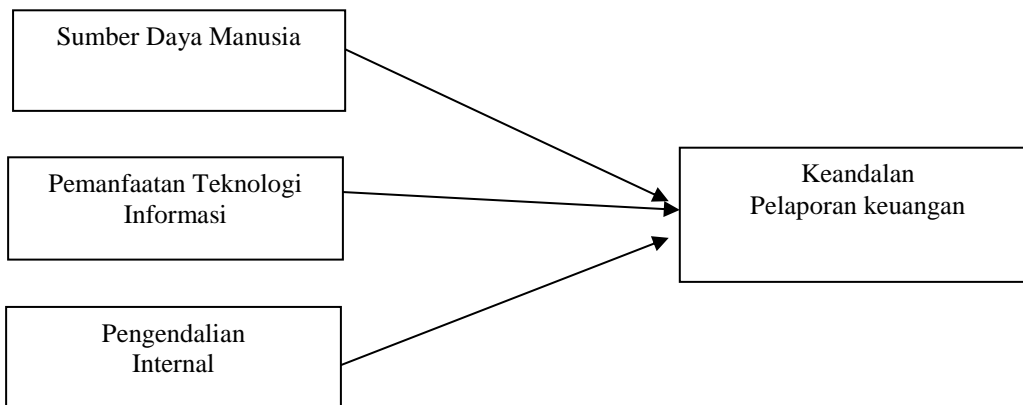
X2 = Teknologi Informasi

X3 = Pengendalian Internal

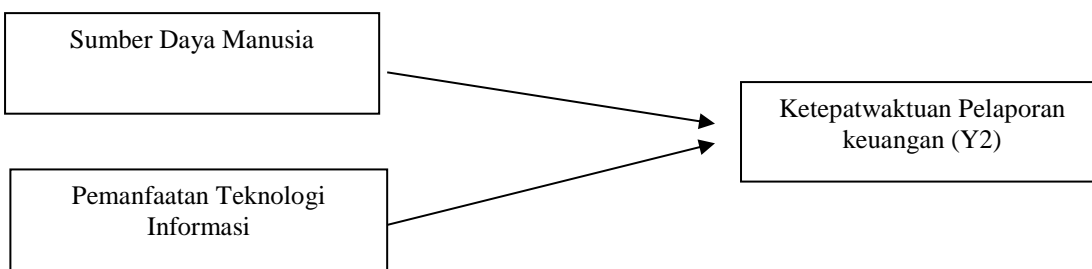
Hipotesis penelitian :

1. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemda
2. Teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemda
3. Pengendalian Internal berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemda.
4. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemda
5. Teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemda

Model penelitian 1:



Model penelitian 2:



5. Analisis Data dan Pembahasan

a. Statistik Deskriptif

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang terdiri dari kepala bagian keuangan, pemegang kas keuangan dan staff bagian keuangan di SKPD Pemda Kabupaten Bengkalis. Jumlah kuesioner yang disebarkan berjumlah 126 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 103 kuesioner, dan digunakan dalam pengujian sebanyak 103 kuesioner. Statistik deskriptif tiap variabel dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Totsdm	103	28.00	50.00	40.3398	4.10058
TotTI	103	19.00	40.00	31.9612	4.20532
TotPI	103	26.00	45.00	38.0000	3.98527
Totandal	103	25.00	35.00	30.0777	2.64830
Totime	103	8.00	15.00	12.0874	1.62159

Sumber: diolah dari hasil penelitian

b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Hasil Uji Validitas Data.

Dalam penelitian ini, uji validitas data dilakukan dengan analisis Korelasi Pearson melalui aplikasi SPSS 17. Uji validitas dilakukan dengan melihat r_{tabel} . Nilai r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 103, maka didapat r tabel sebesar 0,193. Dari hasil pengujian didapat nilai r hitung lebih besar dari r_{tabel} , sehingga semua instrumen yang digunakan adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas Data.

Hasil uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Keterangan
Sumber Daya Manusia	10	0,760	Reliabel
Teknologi Informasi	8	0,785	Reliable
Pengendalian Intern Akuntansi	9	0,871	Reliabel
Keandalan	7	0,835	Reliabel
Ketepatan Waktu	3	0,758	Reliabel

Sumber: Data olahan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha yang lebih besar dari 0,6. Sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas.

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati plot grafis distribusi normal dan uji statistik dari distribusi residual. Uji statistik dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov *test* (Hair *et.al*, 2006). Hasil uji mengindikasikan bahwa distribusi

residual adalah normal karena nilai Kolmogorov-Smirnov tidak signifikan ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam regresi terpenuhi.

Multikolinearitas.

Hasil pengujian diperoleh nilai *tolerance* berada di atas atau 0,10 dan nilai *VIF* dibawah atau 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari pengaruh multikolinearitas.

Autokorelasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson yaitu 1.690. Yang mana nilai tersebut berada diantara antara -2 sampai dengan +2 yang berarti tidak ada autokorelasi.

Heteroskedastisitas.

Hasil pengujian menunjukkan *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebarkan) maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis 1 sampai dengan 3 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Hasil Pengujian Hipotesis 1 sampai dengan 3

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.053	2.307		5.223	.000
	SDM	.057	.058	.088	.975	.332
	TI	.045	.067	.072	.676	.501
	PIA	.376	.066	.566	5.703	.000

a. Dependent Variable: Andal

Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa hanya pengendalian interen akuntansi yang berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari alpha (0,05). Hal ini mendukung berbagai literatur yang menjelaskan tentang tujuan dari pengendalian intern akuntansi yaitu memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan.

Sementara itu sumber daya manusia dan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Ini disebabkan karena sebagian besar pegawai subbagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka Pemda Bengkalis merekrut tenaga akuntan yang ditempatkan di setiap SKPD untuk membantu penyusunan laporan keuangan dan pegawai sering diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Teknologi informasi juga belum dimanfaatkan secara optimal, dan dalam proses penyusunan laporan keuangan sebagian besar komputer hanya digunakan untuk pengetikan saja, sehingga teknologi informasi ini tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal.

Hasil pengujian hipotesis 4 dan 5 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 dan 5
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.323	1.549		4.081	.000
SDM	.069	.044	.174	1.581	.117
TI	.093	.042	.242	2.202	.030

a. Dependent Variable: Tepat Waktu

Hasil pengujian diketahui bahwa teknologi berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan dengan signifikansi sebesar 0,030 yang lebih kecil dari alpha (0,05). Sementara sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan dengan signifikansi sebesar 0,117. Dari hasil pengujian didapat kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi dalam penyusunan laporan keuangan dapat membantu SKPD untuk menyusun laporan keuangan yang tepat waktu.

Hasil pengujian untuk model 1 dan 2 menunjukkan nilai F sebesar 25,332 dan 7,748 dengan probabilitas masing-masing 0,000 dan $0,001 < \alpha < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa model tersebut layak digunakan. Nilai adjusted R Square sebesar 0,417 dan 0,117. Ini berarti variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik.

6. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Hasil Pengujian validitas dan reliabilitas untuk seluruh variabel menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang sesuai.
- 2) Hasil pengujian normalitas data serta asumsi klasik terhadap seluruh variabel menunjukkan bahwa semua data normal dan memenuhi asumsi klasik.
- 3) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan, sedangkan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh terhadap Keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Sumber Daya manusia juga tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu tapi teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemda Bengkalis.

b. Saran

- 1) Penelitian hanya menggunakan data yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Agar hasil dapat digeneralisasi, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota dari suatu Provinsi.

- 2). Untuk mengumpulkan data penelitian hanya menggunakan daftar kuisioner, yang kemungkinan tidak di jawab oleh responden yang tepat sehingga menghasilkan jawaban yang bias. Penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan melakukan interview langsung dengan responden disamping pemberian kuisioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah dikabupaten batang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. *Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam, (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV Penerbit UNDIP
- Indrianto, Nur, Bambang Supomo, (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Indriasari, Desi, dan Ertambang Nahartyo, (2008). *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. *Symposium nasional akuntansi*.
- Mahmudi, (2007). *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, social, dan politik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana good corporate govermence*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, vol 2. No. 1. Hal 1-17.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rosalin, Faristina, 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Skripsi.UNDIP.

Sugijanto. (2007). *Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1.Hal. 50-66.

Tuasikal.(2007). *Pengaruh Pemahaman System Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kab.Maluku Tengah Di Provinsi Maluku)*. Jurnal Akuntansi dan Sektor Publik, Vol.08, No1,Februari 2007.

Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. (2010). *Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah dengan variable intervening pengendalian interen akuntansi (studi empiris di PEMDA SUBOSUKAWONOSTRATEN)*. Simposium Nasional Akuntansi Indonesia XIII.